



KEPUTUSAN

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM,
KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN

NOMOR KEP-8/D2/03/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALUR PENUGASAN DAN FORMAT LAPORAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM,
KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (9) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya Petunjuk Teknis Alur

Penugasan dan Format Laporan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Alur Penugasan dan Format Laporan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);

5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP 6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan *Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Alur Penugasan dan Format Laporan Pengawasan Pelaksanaan *Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Kepala ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Alur Penugasan dan Format Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas Pelaksanaan *Vaksinasi* dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- KETIGA : Petunjuk Teknis Alur Penugasan dan Format Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan *Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Deputy Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG
PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
KEBUDAYAAN,



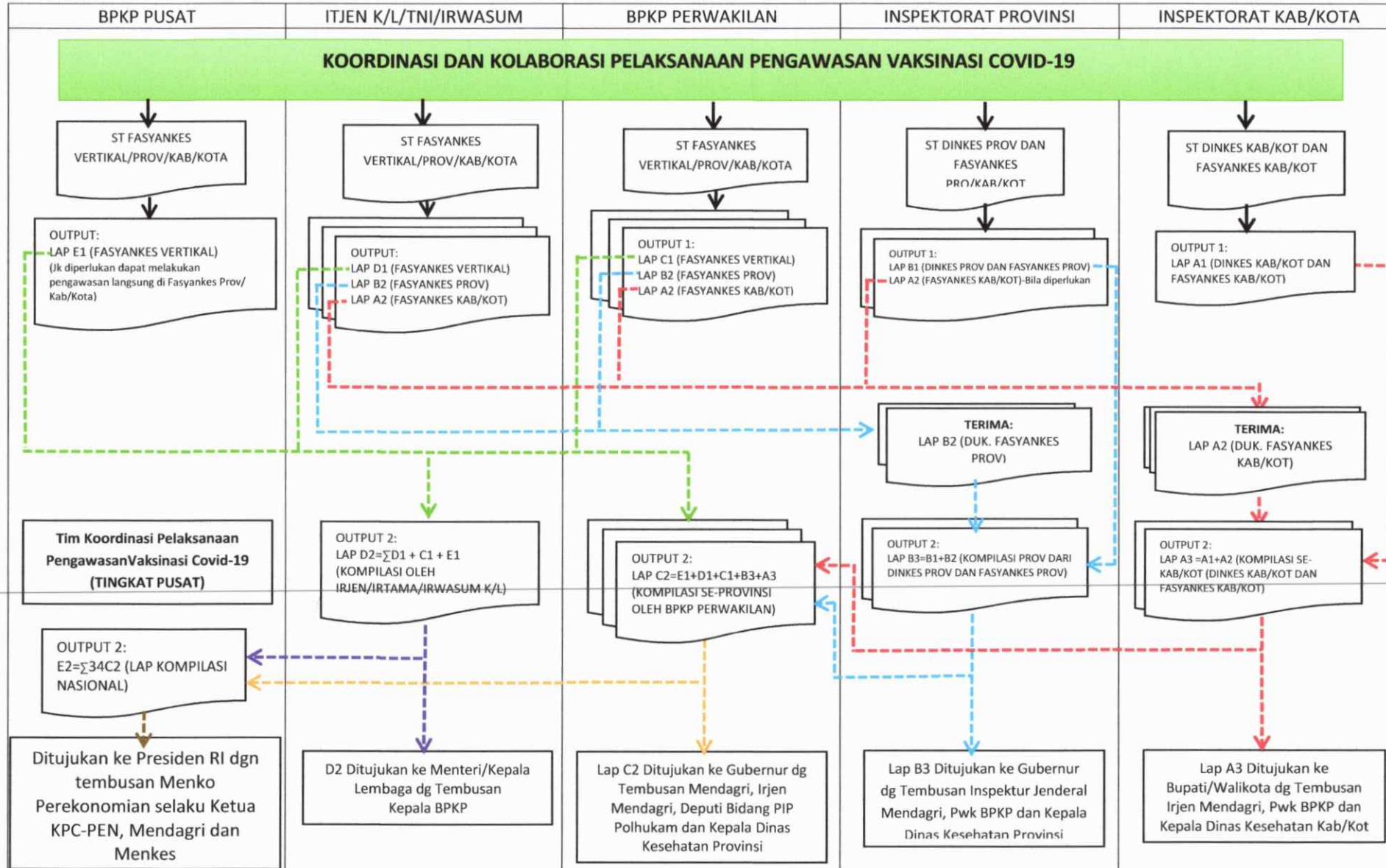
IWAN TAUFIQ PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN BIDANG PENGAWASAN
INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK,
HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN
MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN
NOMOR KEP-8/D2/03/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ALUR PENUGASAN
DAN FORMAT LAPORAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* BAGI APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH
DAERAH

PETUNJUK TEKNIS ALUR PENUGASAN DAN FORMAT LAPORAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)* BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

- I. Alur Penugasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

ALUR PENUGASAN DAN PELAPORAN



PEASAN ALUR PENUGASAN DAN PELAPORAN

NO	APIP	RUANG LINGKUP PENUGASAN	TUJUAN SURAT TUGAS	OUTPUT (LAPORAN)	TUJUAN LAPORAN	TEMBUSAN LAPORAN
1.	INS'ORAT KAETEN/KOTA	Dinas Kesehatan Kab/Kot dan Fasyankes Kab/Kot	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Lap A1 (Dinkes Kabupaten/Kota dan Fasyakes Kabupaten/Kota)	Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kot	-
				Lap A3=A1+A2 (Kompilasi Kabupaten/Kota)	Bupati/Walikota	a. Inspektur Jenderal Mendagri; b. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi; c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2.	INS'ORAT PRGI	Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes Provinsi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Lap B1 (Dinkes Provinsi dan Fasyakes Provinsi)	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	-
		Fasyankes Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Lap A2 (Fasyankes Kabupaten/Kota)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Inspektur Kabupaten/Kota
				Lap B3=B1+B2 (Kompilasi Provinsi)	Gubernur	a. Inspektur Jenderal Mendagri; b. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi; c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
3.	PEKILAN BPKP	Fasyankes Vertikal (RS Vertikal/KKP)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	Lap C1 (Fasyankes Vertikal)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	Irjen K/L/TNI/Irwasum
		Fasyankes Provinsi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Lap B2 (Fasyankes Provinsi)	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Inspektur Provinsi
		Fasyankes Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Lap A2 (Fasyankes Kabupaten/Kota)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Inspektur Kabupaten/Kota
				Lap C2=E1+D1+C1+B3+A3 (Kompilasi Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Gubernur	a. Menteri Dalam Negeri; b. Irjen Mendagri; c. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
4.	INS'ORAT JENAL K/LRWASUM	Fasyankes Vertikal (RS Vertikal/KKP)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	Lap D1 (Fasyankes Vertikal)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi sesuai wilayahnya
		Fasyankes Provinsi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Lap B2 (Fasyankes Provinsi)	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Inspektur Provinsi
		Fasyankes Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Lap A2 (Fasyankes Kabupaten/Kota)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Inspektur Kabupaten/Kota
				Lap D2=ΣD1 (Kompilasi Fasyankes Vertikal oleh Itjen/Irtama/ Irwasum)	Menteri/Kepala Lembaga	Kepala BPKP
5.	BPHSAT	Fasyankes Vertikal (RS Vertikal/KKP)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	Lap E1 (Fasyankes Vertikal)	Pimpinan Fasyankes Vertikal	a. Irjen K/L/TNI/Irwasum b. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi sesuai wilayahnya
				Lap E2=34C2 (Kompilasi Nasional)	Presiden	Menko Perekonomian selaku Ka KPC-PEN, Mendagri dan Menkes

- II. Format Laporan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

KODE-A1

LOGO/KOP

APIP KABUPATEN/KOTA

**LAPORAN HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA
KABUPATEN/KOTA.....**

NOMOR :
TANGGAL : 2021

LOGO/KOP APIP KABUPATEN/KOTA
Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2021
Lampiran : ...
Hal : Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada
Kabupaten/Kota.....

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.....
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada Kabupaten/Kota....., dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- g. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten/Kota..... Nomor ST-..... tanggal Januari 2021 perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

a. Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..... dengan jumlah audit uji petik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

Contoh: **Tabel-1**

No	Jenis Fasyankes	Jumlah	Keterangan
1.	Puskesmas		
2.	RSUD Kab/Kot		
3.		
4.		

b. Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

c. Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tahun 2021 dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes sebanyak fasyankes pada Kabupaten/Kota... sebanyak.... hari Pemeriksaan, dengan jumlah auditor sebanyakorang.

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam

rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.
- b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum

a. Identitas auditan

Menginformasikan nama dan alamat kantor, dan nama, nomor dan tanggal SK jabatan pimpinan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

- 1) *Merupakan data dan informasi pasca pelaksanaan satu siklus vaksinasi (2 kali suntikan).*
- 2) *Menginformasikan sumber dana, pagu anggaran dan realisasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.*
- 3) *Anggaran merupakan dukungan dari APBN/APBD (Kabupaten/Kota)/Sumber Dana Lainnya untuk pelaksanaan vaksinasi*

Contoh:Tabel-2

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%-tase
1.	APBN			
2.	APBD			
3.	Lainnya			
Jumlah				

c. Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

- 1) *Merupakan data dan informasi pasca pelaksanaan satu siklus vaksinasi (2 kali suntik).*
- 2) *Menginformasikan daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan "existing" dan yang ditetapkan/ditugaskan (Klinik/RS Swasta yang melakukan MoU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana vaksinasi di wilayah Kabupaten Kota.*

Contoh:Tabel-3

No.	Jenis Fasyankes	Jumlah Fasyankes		Keterangan
		Existing	Pelaksana Vaksinasi	
1.	Puskesmas			
2.	RSUD Kab/Kot			

3.	RSUD Provinsi				
4.	UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll)				
5.	Klinik Swasta				
6.	RS Swasta				
Jumlah					

d. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Vaksinasi (Vaksinator)

- 1) Menginformasikan total Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan vaksinasi Covid-19 dan SDMK yang ditugaskan melaksanakan vaksinasi di Fasyankes di wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Menginformasikan rasio pelayanan jumlah SDMK yang ditugaskan dibandingkan dengan jumlah Target Sasaran Vaksinasi.

Contoh:Tabel-4

No	Jenis Fasyankes	Vaksinator Sudah Dilatih			Vaksinator ditugaskan		
		Dokter	Perawat	Bidan	Dokter	Perawat	Bidan
1.	∑ Puskesmas Org Org Org Org Org Org
2.	∑ RSUD Kab/Kot Org Org Org Org Org Org
3.	∑ RSUD Provinsi Org Org Org Org Org Org
4.	∑ UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll) Org Org Org Org Org Org
5.	∑ Klinik Swasta Org Org Org Org Org Org
6.	∑ RS Swasta Org Org Org Org Org Org
Jumlah	Org Org Org Org Org Org

e. Alokasi dan Realisasi Distribusi Vaksin Covid-19.

- 1) Merupakan semua data dan informasi dalam satu periode waktu pelaksanaan vaksinasi satu siklus 2 kali suntikan.
- 2) Menginformasikan alokasi vaksin (top down Pusat) dari Dinas Kesehatan Provinsi dan realisasi distribusi vaksin yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Contoh:Tabel-5

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Vaksin		Ket.
			Diterima	Dikirim	
	Alokasi Provinsi	Vial		
1.	Diterima dari Dinkes Provinsi	Vial		
2.	Realisasi distribusi ke Fasyankes				
	a. ∑ Puskesmas	Vial		
	b. ∑ RSUD Kab/Kot	Vial		
	c. ∑ RSUD Provinsi	Vial		
	d. ∑ UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll)	Vial		
	e. ∑ Klinik Swasta	Vial		

	f. Σ RS Swasta	Vial	
	Jumlah distribusi	Vial	
3.	Stock Gudang Dinkes Kabupaten/Kota	Vial	

Sumber data: Aplikasi P-Care atau BAST

f. Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi.

- 1) Menginformasikan total target sasaran vaksinasi dan realisasi dalam periode satu siklus vaksinasi (2x suntik)
- 2) Jumlah alokasi sasaran vaksinasi di Kabupaten/Kota sesuai dengan data pada Aplikasi (isian kolom 3).
- 3) Jumlah sasaran yang hadir pada masing-masing jenis fasyankes (isian kolom 4)
- 4) Jumlah sasaran (hadir) hasil pelayanan 4 meja di masing-masing jenis fasyankes (isian kolom 5, 6)
- 5) Jumlah sasaran yang ditolak oleh sistem (isian kolom 7)
- 6) Jumlah target sasaran yang hanya menerima satu kali suntikan dan tidak hadir pada saat jadwal suntikan ke 2 (DO) di masing-masing jenis fasyankes (isian kolom 8)
- 7) Jumlah kejadian KIPI pada masing-masing fasyankes yang diuji petik (isian kolom 9)
- 8) Jika tidak memungkinkan mendapatkan data per masing-masing jenis fasyankes dapat diinfokan data secara global Kabupaten/Kota

Contoh: Tabel-6

No	Jenis Fasyankes	Alokasi Sasaran dalam aplikasi	Hadir	Hasil Skrining		Batal	DO	KIPI	Capaian Target
				Divaksin	Ditunda				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Σ Puskesmas	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	
2.	Σ RSUD Kab/Kot	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	
3.	Σ RSUD Provinsi	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	
4.	Σ UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll)	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	
5.	Σ Klinik Swasta	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	
6.	Σ RS Swasta	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	
Jumlah		...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org		

Cantumkan sumber data dan tanggal dan jam cut off pelaporan.

Sumber data = Ouput Aplikasi yang digunakan untuk mencatat pelaksanaan vaksinasi (Aplikasi P-Care).

g. Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.

- 1) Menginformasikan saldo awal (existing) sarana dan logistik pendukung vaksinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- 2) Menginformasikan jumlah sarana dan logistik pendukung yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi/Pusat;
- 3) Menginformasikan total sarana dan logistik pendukung yang dikirimkan kepada seluruh fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;
- 4) Menginformasikan saldo sarana dan logistik pendukung di Kantor Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 5) Membuat lampiran untuk masing – masing penerima distribusi sarana dan logistik pendukung vaksinasi.
- 6) Terkait dengan kartu vaksinasi kemungkinan yang didistribusikan kurang dari kebutuhan (karena kartu vaksinasi dapat langsung di print melalui aplikasi p-care)

Contoh:Tabel-7

No	Uraian	Logistik			APD			Cold Chain (Nihil jk tdk ada)				Kartu Vaksinasi	
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D	
	Alokasi dari Provinsi												
1.	Saldo Awal (milik Dinkes Kabupaten/Kota sendiri)												
2.	Jumlah diterima (dari Dinkes Provinsi/Pusat)												
3.	Distribusi ke Fasyankes												
	a \sum Puskesmas												
	b \sum RSUD Kab/Kot												
	c \sum RSUD Provinsi												
	d \sum UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll)												
	e \sum Klinik Swasta												
	f \sum RS Swasta												
	Jumlah dikirim ke Fasyankes												
4.	Stock Dinkes di Kab/Kota (1+2-3)												

Sumber data: Aplikasi yang digunakan untuk mencatat alur barang dalam pelaksanaan vaksinasi (Aplikasi SMILE)

Keterangan Kode:

No	Jenis	Kode	Keterangan	Satuan
A.	Logistik	A.1	Auto Disable Syringe	Pcs
		A.2	Alcohol Swab	Pcs
		A.3	Safety Box	Pcs
B.	APD	B.1	Masker	Pcs
		B.2	Face Shield	Pcs
		B.3	Sarung Tangan	Pcs
C.	Cold Chain	C.1	Vaccine Refrigerator	
		C.2	Cold Box	
		C.3	Cold Pack	

		C.4	Vaccine Carrier	
D.	Kartu Vaksinasi	D		

7. Temuan audit Umum.

a. Penilaian ketepatan Sasaran

- 1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".
- 2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
TAO b.4 Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten/Kota tidak tepat sasaran

b. Penilaian ketepatan Jumlah

- 1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".
- 2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
 - a) TAO a.1 Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi;
 - b) TAO a.2 Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan jumlah sasaran;
 - c) TAO a.3 Distribusi vaksin dari Provinsi ke Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan ketentuan;
 - d) TAO a.4 Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik di Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - e) TAO b.3 Target output Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan tidak tercapai.

c. Penilaian ketepatan Waktu

- 1) Uraikan permasalahan terkait dengan kesiapan dan kesesuaian jadwal dinkes Kesehatan kabupaten/kota pada kegiatan distribusi vaksin dan logistik yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".
- 2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
TAO b.2 Monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 tidak dilakukan sesuai jadwal

d. Penilaian Ketepatan Kualitas

- 1) Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi";
- 2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

- a) TAO b.1 *Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti;*
 - b) TAO c.1 *Kualitas cold chain vaksin di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seperti, cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer tidak memadai.*
- 3) *Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas*

e. Penilaian Ketepatan Administrasi

- 1) *Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan rekomendasi*
- 2) *Sesuai dengan TAO sebagai berikut:*
 - a) TAO b.1 *Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti;*
 - b) TAO b.5 *Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti;*
 - c) TAO b.6 *Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

f. Penilaian Efisiensi Pelaksanaan Distribusi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan distribusi vaksin dan peralatan pendukung/logistik apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan dan efisien. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi".

g. Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan distribusi vaksin dan peralatan pendukung/logistik. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi".

8. Hasil Audit Uji Petik di Fasyankes

Merupakan hasil temuan yang dijumpai di fasyankes yang dilakukan uji petik.

a. Informasi Umum

1) Jumlah uji petik audit pada Fasyankes pelaksana vaskinasi

- a) *Menginformasikan jumlah Fasyankes yang dilakukan uji petik yang berisikan dengan memuat seperti contoh.*

Contoh: Tabel-8

No	Nama Fasyankes	Alamat	Kepala/Pimpinan Fasyankes / NIP	SK Penetapan	
				Nomor	Tanggal
1.	Fasyankes A				

2.	Fasyankes B				
3.	Fasyankes C				
4.	Dst.....				

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

Menginformasikan sumber dana (APBN, APBD, Lainnya), pagu anggaran, dan realisasasi penggunaan dana vaksinasi di masing-masing fasyankes pada periode satu siklus vaskinasi (2x suntik) yang dilakukan uji petik.

Contoh:tabel-9

No	Nama Fasyankes	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%-tase
1.	Fasyankes A	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD • Lainnya 			
2.	Fasyankes B				
3.	Fasyankes C				
4.	Dst.....				
Jumlah					

3) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksanaan Vaksinasi/Vaksinotor

a) Menginformasikan jumlah SDM-K-Vaksinotor yang sudah dilatih dibandingkan dengan vaksinotor yang ditugaskan (Surat tugas) pada masing-masing fasyankes pada periode satu siklus vaskinasi (2x suntik) yang dilakukan uji petik.

b) Menginformasikan rasio pelayanan SDM-K dan target sasaran per masing-masing Fasyankes.

Contoh:Tabel-10

No	Fasyankes	Vaksinotor yang dilatih			Vaksinotor yang ditugaskan		
		Dokter	Perawat	Bidan	Dokter	Perawat	Bidan
1.	Fasyankes A Org Org Org Org Org Org
2.	Fasyankes B Org Org Org Org Org Org
3.	Fasyankes C Org Org Org Org Org Org
4.	Dst..... Org Org Org Org Org Org
	Jumlah Org Org Org Org Org Org

4) Alokasi dan Realisasi Distribusi dan Penggunaan Vaksin

a) Menginformasikan distribusi dan penggunaan vaksin di masing-masing fasyankes.

b) Menginformasikan realisasi distribusi vaksin yang diterima oleh masing-masing fasyankes serta jumlah vaksin yang digunakan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi.

c) Menginformasikan stock akhir vaksin di masing-masing fasyankes berdasarkan catatan (isian kolom 5) dan stock akhir vaksin berdasarkan stock opname (isian kolom 6)

d) Menginformasikan selisih stock akhir berdasarkan catatan dan stock opname dan menjelaskan kondisi selisih vaksin (isian kolom 7)

e) Menginformasikan kondisi vaksin (isian kolom 8).

Contoh: Tabel-11

No	Nama Fasyankes	Berdasarkan Catatan			Sisa Vaksin (Stock Opname)	Selisih	Keterangan
		Vaksin diterima	Vaksin digunakan	Sisa Vaksin			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7=5-6)	(8)
1.	Fasyankes A	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
2.	Fasyankes B	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
3.	Fasyankes C	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
4.	Dst.....	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
Jumlah		...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	

Sumber Data:..... Per tanggal:

5) Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi

- a) Menginformasikan total target sasaran vaksinasi dan realisasi dalam periode satu siklus vaksinasi (2x suntik)
- b) Jumlah sasaran yang hadir ke masing-masing Fasyankes yang dilakukan uji petik (isian kolom 3)
- c) Jumlah sasaran (hadir) hasil pelayanan 4 meja di masing-masing fasyankes yang dilakukan uji petik (isian kolom 4,5)
- d) Jumlah sasaran yang ditolak oleh sistem (isian kolom 6)
- e) Jumlah sasaran yang hanya menerima satu kali suntikan dan tidak hadir pada saat jadwal suntikan ke 2 (DO) di masing-masing fasyankes yang dilakukan uji petik (isian kolom 7)
- f) Jumlah kejadian KIPI pada masing-masing fasyankes yang diuji petik (isian kolom 8)

Contoh: Tabel-12

No	Nama Fasyankes	Hadir	Hasil Skrining		Ditolak	DO	KIPI
			Divaksin	Ditunda/Tidak diberikan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Fasyankes A	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
2.	Fasyankes B	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
3.	Fasyankes C	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
4.	Dst.....	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
Jumlah		...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org

b. Temuan Hasil audit di fasyankes uji petik.

1) Penilaian Ketepatan Sasaran

Contoh:

- a) Menguraikan permasalahan ketepatan sasaran yaitu terkait dengan kriteria, prioritas penerima vaksin sesuai tahapan, wilayah dan jadwal vaksinasi yang telah ditetapkan oleh SK Menteri Kesehatan. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria,

penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

b) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

TAO b.4 Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran

2) Penilaian Ketepatan Jumlah

Contoh:

a) *Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.*

b) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1. *TAO b.2 Terdapat kejadian Drop Out;*
2. *TAO c.2 Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak tercapai*

c) *Yakini apakah ada vaksin yang diterima dari dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang kirimkan lebih lanjut kepada Fasyankes lainnya. Jika ada, buat catatan atas kondisi tersebut.*

3) Penilaian Ketepatan Waktu

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Kondisi yang mungkin terjadi yaitu: Ketidaksiapan fasyankes karena Vaksin/peralatan pendukung/logistik/SDMK (Vaksinator) kurang/belum tersedia sesuai dengan jadwal pelaksanaan vaksinasi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan vaksinasi tidak tepat waktu.

Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

4) Penilaian Ketepatan Kualitas

Contoh:

a) *Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan*

harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

b) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1 TAO a.1 Vaksin COVID-19 tidak disimpan di cold chain sesuai standard

2 TAO a.2 Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar

3 TAO b.3 KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti

c) Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas

5) Penilaian Ketepatan Administrasi

Contoh:

Berdasarkan hasil audit terhadap ketepatan administrasi dalam pelaksanaan program vaksinasi diperoleh simpulan sebagai berikut:

a) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

b) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1 TAO b.1 Pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan

2 TAO c.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE

3 TAO c.3 Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal

4 TAO c.4 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

6) Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh). Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”.

7) Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan vaksinasi. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi".

9. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah permasalahan-permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat).

(Temuan lainnya yang tidak ada di TAO).

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Inspektur Kabupaten/Kota

.....
NIP

Tembusan Yth:
Bupati/Walikota.....

LOGO/KOP SURAT

APIP PELAKSANA AUDIT FASYANKES

LAPORAN HASIL AUDIT
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA
FASYANKES VERTIKAL/PROVINSI/KAB/KOT.....
DI KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI.....

NOMOR :
TANGGAL : 2021

LOGO/KOP BPKP/APIP K/L/DAERAH
Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2021
Lampiran : ...
Hal : Laporan Hasil audit Program Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus
Diseases 2019* (COVID-19) pada.....
(Fasyankes Vertikal/Provinsi/Kabupaten/Kota) di
Kabupaten/Kota/Provinsi.....

Yth. (sesuai dengan surat penugasannya)

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (untuk LAP-KODE A2)
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (untuk LAP-KODE B2)
 3. Pimpinan Fasyankes Vertikal (untuk LAP-KODE C1;D1;E1)
- di

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Program Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada Fasyankes Vertikal/Provinsi/Kabupaten/Kota..... di wilayah Kabupaten/Kota..... Provinsi....., dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (untuk BPKP);
- c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor

- HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- h. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
 - i. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP/ Inspektur K/L/Daerah..... Nomor ST-..... tanggal Januari 2021 Perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan Ruang Lingkup audit

- a. Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.
Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 Tahun 2021 dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes sebanyak fasyankes pada Kabupaten/Kota... sebanyak.... hari Pemeriksaan, dengan jumlah auditor sebanyakorang.

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan

penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.

- b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi Umum

a. Jumlah Fasyankes pelaksana vaksinasi

Menginformasikan jumlah Fasyankes yang dilakukan dilakukan auditnya.

Contoh: Tabel-1

No	Nama Fasyankes	Alamat	Kepala/Pimpinan Fasyankes / NIP	SK Penetapan	
				Nomor	Tanggal
1.	Fasyankes A				
2.	Fasyankes B				
3.	Fasyankes C				
4.	Dst.....				

b. Sumber dan Realisasi Dana Pelaksanaan Vaksinasi

Menginformasikan sumber dana (APBN, APBD, Lainnya), pagu dana, dan realisasi penggunaan dana vaksinasi di masing-masing fasyankes pada periode satu siklus vaskinasi (2x suntik) yang dilakukan auditnya.

Contoh:

No	Nama Fasyankes	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%-tase
1.	Fasyankes A	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD • Lainnya (BLU) 			
2.	Fasyankes B	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Lainnya 			
3.	Fasyankes C	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Lainnya 			
4.	Dst.....				
Jumlah					

Sumber Data:

Dana lainnya : BLU

c. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksanaan Vaksinasi/Vaksinator

Menginformasikan jumlah SDM-Vaksinator yang sudah dilatih dibandingkan dengan vaksinator yang ditugaskan (Surat tugas) pada masing-masing fasyankes pada periode satu siklus vaskinasi (2x suntik) yang dilakukan auditnya.

Contoh: Tabel-2

No	Fasyankes	Vaksinator sudah dilatih			Vaksinator ditugaskan		
		Dokter	Perawat	Bidan	Dokter	Perawat	Bidan

1.	Fasyankes A Org Org Org Org Org Org
2.	Fasyankes B Org Org Org Org Org Org
3.	Fasyankes C Org Org Org Org Org Org
4.	Dst..... Org Org Org Org Org Org
	Jumlah Org Org Org Org Org Org

Sumber Data:.....;per tanggal:

d. Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi

- 1) Menginformasikan total target sasaran vaksinasi dan realisasi dalam periode satu siklus vaksinasi (2x suntik)
- 2) Jumlah sasaran yang hadir ke masing-masing Fasyankes yang dilakukan auditnya (isian kolom 3)
- 3) Jumlah sasaran (hadir) hasil pelayanan 4 meja di masing-masing fasyankes yang dilakukan auditnya (isian kolom 4,5)
- 4) Jumlah sasaran yang ditolak oleh sistem (isian kolom 6)
- 5) Jumlah sasaran yang hanya menerima satu kali suntikan dan tidak hadir pada saat jadwal suntikan ke-2 (DO) di masing-masing fasyankes yang dilakukan auditnya (isian kolom 7)
- 6) Jumlah kejadian KIPi pada masing-masing fasyankes yang diauditnya (isian kolom 8)

Contoh:Tabel-3

No	Nama Fasyankes	Hadir	Hasil Skrining		Batal	DO	KIPi
			Divaksin	Ditunda			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Fasyankes A	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
2.	Fasyankes B	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
3.	Fasyankes C	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
4.	Dst.....	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
	Jumlah	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org

Sumber Data:..... Per tanggal:

Sesuai dengan Surat Dirjen P2P Kemkes Nomor: SR.02.06/1/73/2021 tanggal 18 Januari 2021 ditujukan kepada Dinkes Provinsi se-Indonesia tentang pembukaan akses P-Care untuk pencatatan pelayanan vaksinasi Covid-19.

e. Alokasi dan Realisasi Distribusi dan Penggunaan Vaksin

- 1) Menginformasikan distribusi dan penggunaan vaksin di masing-masing fasyankes.
- 2) Menginformasikan realisasi distribusi vaksin yang diterima oleh masing-masing fasyankes serta jumlah vaksin yang digunakan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi.
- 3) Menginformasikan stock akhir vaksin di masing-masing fasyankes berdasarkan catatan (isian kolom 5) dan stock akhir vaksin berdasarkan stock opname (isian kolom 6)
- 4) Menginformasikan selisih stock akhir berdasarkan catatan dan stock opname

dan menjelaskan kondisi selisih vaksin (isian kolom 7)

5) Menginformasikan kondisi vaksin (isian kolom 8).

Contoh: Tabel-4

No	Nama Fasyankes	Berdasarkan Catatan			Sisa Vaksin (Stock Opname)	Selisih	Keterangan
		Vaksin diterima	Vaksin digunakan	Sisa Vaksin			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7=5-6)	(8)
1.	Fasyankes A	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
2.	Fasyankes B	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
3.	Fasyankes C	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
4.	Dst.....	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
Jumlah		...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	

Yang dimaksud 1 vial = 1 dosis untuk vaksin jadi.

Sumber Data:..... Per tanggal:

7. Temuan Hasil audit.

a. Penilaian Ketepatan Sasaran

Contoh:

- 1) Menguraikan permasalahan ketepatan sasaran yaitu terkait dengan kriteria, prioritas penerima vaksin sesuai tahapan, dan wilayah (misalnya data Aplikasi P-Care). Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.
- 2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
 TAO b.4 Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran

b. Penilaian Ketepatan Jumlah

Contoh:

- 1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.
- 2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
 - a) TAO b.2 Terdapat kejadian Drop Out;
 - b) TAO c.2 Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak tercapai
- 3) Yakini apakah ada vaksin yang diterima dari dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang kirimkan lebih lanjut kepada Fasyankes lainnya. Jika ada, buat catatan atas kondisi tersebut.

c. Penilaian Ketepatan Waktu

Contoh:

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Kondisi yang mungkin terjadi yaitu: *Ketidaksiapan fasyankes karena Vaksin/peralatan pendukung/logistik/SDMK (Vaksinator) kurang/belum tersedia sesuai dengan jadwal pelaksanaan vaksinasi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan vaksinasi belum bisa dilaksanakan mengikuti jadwal.*

Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

d. Penilaian Ketepatan Kualitas

Contoh:

- 1) *Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.*
- 2) *Sesuai dengan TAO sebagai berikut:*
 - a) *TAO a.1 Vaksin COVID-19 tidak disimpan di cold chain sesuai standard*
 - b) *TAO a.2 Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar*
 - c) *TAO b.3 KIPi pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti*
- 3) *Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas.*

e. Penilaian Ketepatan Administrasi

- 1) *Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.*
- 2) *Sesuai dengan TAO sebagai berikut:*
 - a) *TAO b.1 Pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan*
 - b) *TAO c.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE*
 - c) *TAO c.3 Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal*
 - d) *TAO c.4 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku*

f. Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh). Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”. **(Jika ada, dirumuskan dari hasil analisis efisiensi pelaksanaan vaksinasi dan TAO yang terjadi pada saat dilakukan auditnya serta analisis saat penyusunan laporan kompilasi provinsi atau nasional).**

g. Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan vaksinasi. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”.

8. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah permasalahan-permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat).

(Temuan lainnya yang tidak ada di TAO).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pimpinan APIP Pelaksana Audit di Fasyankes

.....

NIP

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten/Kota..... (untuk LAP KODE-A2)
2. Inspektur Provinsi..... (untuk LAP KODE-B2)
3. BPKP Perwakilan Provinsi....(untuk LAP KODE-D1 dan E1)
4. Irjen K/L/TNI/Irwasum....(untuk LAP KODE-E1 dan KODE-C1)

LOGO/KOP
APIP KABUPATEN/KOTA

LAPORAN KOMPILASI HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 SE-
KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR :
TANGGAL : 2021

LOGO/KOP APIP KABUPATEN/KOTA
Identitas dan Alamat

Nomor : 2021
 Lampiran : ...
 Hal : Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan
 Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
 Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-
 19) se-Kabupaten/Kota.....

Yth. Bupati/Walikota.....
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) se-Kabupaten/Kota..... berdasarkan Laporan Hasil Audit terlampir (*dibuatkan lampiran daftar Nama Instansi APIP, Nomor dan Tanggal Laporan se-Kabupaten/Kota*), dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- g. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor

HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten/Kota..... Nomor ST-..... tanggal Januari 2021 perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..... dengan jumlah audit uji petik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

Contoh: **Tabel-1**

No	Jenis Fasyankes	Jumlah	Keterangan
1.	Puskesmas		
2.	RSUD Kab/Kot		
5.	Klinik Swasta		
6.	RS Swasta		

Sumber data: LAP Kode A1 dan A2,

- 2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.
- 3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tahun 2021 dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes sebanyak..... fasyankes pada Kabupaten/Kota... sebanyak.... hari Pemeriksaan, dengan jumlah auditor sebanyak.....orang.
- 4)

Contoh: **Tabel-2**

No.	Asal APIP	Jumlah Auditor	Jumlah HP
1.	Inspektorat Kabupaten/Kota.....		
2.	Inspektorat Provinsi....		
3.	BPKP Perwakilan....		

4.	Itjen K/L/TNI/Irwasum...			
	Jumlah			

Sumber data: Lap KODE-A1 dan A2

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.
- b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum

1) Identitas auditan

Menginformasikan nama dan alamat kantor, dan nama, nomor dan tanggal SK jabatan pimpinan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2) Sumber dan Realisasi Dana Pelaksanaan Vaksinasi

- a. *Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik;*
- b. *Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggaran dan realisasi penggunaan anggaran se-Kabupaten/Kota.*

Contoh: Tabel-3

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%-tase
a)	APBN			
b)	APBD			
c)	Lainnya (BLU)			
Jumlah				

Sumber data: Lap KODE-A1 dan A2

3) Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

- a. *Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik;*

- b. Menginformasikan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan “existing” dan jumlah yang ditetapkan/ditugaskan (MoU) sebagai pelaksana vaksinasi di wilayah Kabupaten Kota.

Contoh: Tabel-4

No.	Jenis Fasyankes	Jumlah Fasyankes		Keterangan
		Existing	Pelaksana Vaksinasi	
1.	Puskesmas			
2.	RSUD Kab/Kot			
3.	RSUD Provinsi			
4.	UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll)			
5.	Klinik Swasta			
6.	RS Swasta			
Jumlah				

Sumber data: Lap KODE-A1 dan A2

(kecuali DKI Jakarta ada di Dinkes Provinsi)

4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Vaksinasi (Vaksinator)

- a. Menginformasikan total Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan vaksinasi Covid-19 dan SDM yang ditugaskan melaksanakan vaksinasi di Fasyankes di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Menginformasikan rasio pelayanan jumlah SDM yang di tugaskan dibandingkan dengan jumlah Target Sasaran Vaksinasi.

Contoh: Tabel-5

No	Jenis Fasyankes	Vaksinator Sudah Dilatih			Vaksinator ditugaskan		
		Dokter	Perawat	Bidan	Dokter	Perawat	Bidan
1.	∑ Puskesmas Org Org Org Org Org Org
2.	∑ RSUD Kab/Kot Org Org Org Org Org Org
3.	∑ RSUD Provinsi Org Org Org Org Org Org
4.	∑ UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll) Org Org Org Org Org Org
5.	∑ Klinik Swasta Org Org Org Org Org Org
6.	∑ RS Swasta Org Org Org Org Org Org
Jumlah	Org Org Org Org Org Org

Sumber data: Lap KODE-A1

(kecuali DKI ada di Dinkes Provinsi)

5) Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-19.

- a. Merupakan seluruh data dan informasi dalam periode waktu pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik;
- b. Menginformasikan alokasi vaksin (top down Pusat) dari Dinas Kesehatan Provinsi dan realisasi vaksin yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- c. Menginformasikan alokasi distribusi vaksin (top down Pusat) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan realisasi distribusi vaksin ke Fasyankes;

6.	∑ RS Swasta	...Vial	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
	JumlahVial	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org

Sumber data: Lap KODE-A1

Lakukan wawancara dengan Fasyankes dan Target Sasaran yang tidak hadir divaksin

7) Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.

- a. Menginformasikan saldo awal (existing) sarana dan logistik pendukung vaksinasi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- b. Menginformasikan jumlah sarana dan logistik pendukung yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi/Pusat;
- c. Menginformasikan total sarana dan logistik pendukung yang dikirimkan kepada seluruh fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;
- d. Menginformasikan saldo sarana dan logistik pendukung di Kantor Kesehatan Kabupaten/Kota.

Contoh: Tabel-8

No	Uraian	Logistik			APD			Cold Chain (Nihil jk tdk ada)				Kartu Vaksinasi	
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D	
1.	Saldo Awal (milik Dinkes Kabupaten/Kota sendiri)												
2.	Jumlah diterima (dari Dinkes Provinsi/Pusat)												
3.	Distribusi ke Fasyankes												
	A ∑ Puskesmas												
	B ∑ RSUD Kab/Kot												
	C ∑ RSUD Provinsi												
	D ∑ UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll)												
	E ∑ Klinik Swasta												
	F ∑ RS Swasta												
	Jumlah dikirim ke Fasyankes												
4.	Stock Dinkes di Kab/Kota (1+2-3)												

Sumber data: Lap KODE-A1

Keterangan:

No	Jenis	Kode	Keterangan	Satuan
A.	Logistik	A.1	Auto Disable Syringe	Pcs
		A.2	Alcohol Swab	Pcs
		A.3	Safety Box	Pcs
B.	APD	B.1	Masker	Pcs
		B.2	Face Shield	Pcs
		B.3	Sarung Tangan	Pcs
C.	Cold Chain	C.1	Vaccine Refrigerator	
		C.2	Cold Box	
		C.3	Cold Pack	
		C.4	Vaccine Carrier	

D.	Kartu Vaksinasi	D			

7. Temuan audit.

Merupakan integrasi temuan audit dari LAP Kode-A1 dan A2

1) Penilaian ketepatan Sasaran

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat target sasaran yang tidak sesuai kriteria dan prioritas kelompok sebanyakorang dengan rincian sebagai berikut:

.....

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A1 dan A2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

2) Penilaian ketepatan Jumlah.

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat jumlah atas distribusi vaksin, sarana pendukung dan logistik dalam rangka pelaksanaan vaskinasi dengan rincian sebagai berikut:

.....

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A1 dan A2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat jumlah pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.

b.

3) Penilaian Ketepatan Waktu

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat kegitan distribusi vaksin, sarana pendukung dan logistik yang tidak sesuai jadwal pelaksanaan vaksinasi di fasyankes dengan rincian sebagai berikut:

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A1 dan A2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat waktu pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

4) Penilaian Ketepatan Kualitas.

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat kualitas terkait tempat penyimpanan vaksin dan layanan pelaksanaan vaksinasi (KIPI) dengan rincian sebagai berikut:

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A1 dan A2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat kualitas pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

5) Penilaian Ketepatan Administrasi

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat administrasi pada tindak lanjut hasil monitoring dan pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan dalam rangka pelayanan

vaksinasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A1 dan A2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat administrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

6) Penilaian efisiensi Pelaksanaan Distribusi dan Vaksinasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan dan efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh).

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A1 dan A2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak efisien dan ekonomis pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

7) Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan vaksinasi.

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A1 dan A2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian

pengendalian risiko fraud pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

8. Hal – hal yang perlu diperhatikan

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO bersumber LAP KODE-A1 dan LAP KODE-A2

Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk menindaklanjuti hal – hal penting yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu Bupati/Walikota diucapkan terima kasih.

Inspektur Kabupaten/Kota

.....

NIP

Tembusan Yth:

- 1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.....(dukungan LAP KODE-C2)
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.....

LOGO/KOP
APIP PROVINSI....

LAPORAN HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA
PROVINSI.....

NOMOR :
TANGGAL : 2021

LOGO/KOP APIP PROVINSI
Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2021
Lampiran : ...
Hal : Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada
Provinsi.....

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.....
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* pada Provinsi....., dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- g. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

h. Surat Tugas Inspektur Provinsi..... Nomor ST-..... tanggal
Januari 2021 perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..... dengan jumlah audit uji petik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi (tidak termasuk hasil audit pada fasyankes kabupaten/kota) sebagai berikut:

Contoh: Tabel-1

No	Jenis Fasyankes	Jumlah	Keterangan
a)	RSUD Provinsi		
b)	Fasyankes lainnya...		
c)		
d)		

2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tahun 2021 dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes sebanyak fasyankes pada Kabupaten/Kota... sebanyak.... hari Pemeriksaan, dengan jumlah auditor sebanyakorang.

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambalian simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.
- b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum

1) Identitas auditan

Menginformasikan nama dan alamat kantor, dan nama, nomor dan tanggal SK jabatan pimpinan kantor Dinas Kesehatan Provinsi.

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

- c. *Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik;*
- d. *Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggaran dan realisasi penggunaan anggaran di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi.*

Contoh:Tabel-2

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%-tase
a)	APBN			
b)	APBD			
Jumlah				

3) Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-19.

- e. *Merupakan semua data dan informasi dalam satu periode waktu pelaksanaan vaksinasi satu siklus 2 kali suntik.*
- f. *Menginformasikan alokasi vaksin (top down) dari Kementerian Kesehatan Pusat kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya realisasi distribusi vaksin yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.*

Contoh:Tabel-3

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
	Alokasi dari Pusat	Vial	
a.	Diterima dari Pusat	Vial	
b.	Realisasi distribusi ke Kab/Kota	Vial	
c.	Stock Gudang Dinkes Provinsi		

Sumber data: Aplikasi P-Care atau BAST

4) Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.

- a. Menginformasikan saldo awal (existing) sarana dan logistik pendukung vaksinasi di Kantor Dinas Kesehatan Pemda Provinsi;
- b. Menginformasikan jumlah sarana dan logistik pendukung yang diterima dari Kementerian Kesehatan;
- c. Menginformasikan total sarana dan logistik pendukung yang dikirimkan kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi;
- d. Menginformasikan saldo sarana dan logistik pendukung di Kantor Kesehatan Pemda Provinsi.
- e. Membuat lampiran untuk masing – masing penerima sarana dan logistik pendukung.

Contoh:Tabel-4

No	Jenis Fasyankes	Logistik			APD	Cold Chain				Kartu Vaksinasi
		Auto Disable Syringe	Alcohol Swab	Safety Box		Vaccine Ref.	Cool Pack	Cool Box	Vaccine Carier	
	Alokasi dari Pusat									
	Saldo Awal Dinkes Prov sendiri)									
1.	Jumlah diterima Pusat									
2.	Distribusi ke Kab/Kota,									
3.	Stock Dinkes di Gudang Prov									

Keterangan APD = Masker, Face Shield dan Sarung Tangan

Sumber data: Aplikasi SMILE atau BAST

7. Temuan audit Umum.

1) Penilaian ketepatan Sasaran

- a. Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.
- b. Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

TAO b.4 Pelaksanaan vaksinasi di Provinsi di wilayah provinsi tidak tepat sasaran

2) Penilaian ketepatan Jumlah.

- a. Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”.
- b. Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
 - 1) TAO a.1 Pemerintah Provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi;
 - 2) TAO a.2 Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima Provinsi tidak sesuai dengan jumlah sasaran;

- 3) TAO a.3 *Distribusi vaksin dari Pusat ke Provinsi tidak sesuai dengan ketentuan;*
- 4) TAO a.4 *Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik di Provinsi tidak sesuai dengan kebutuhan;*
- 5) TAO b.3 *Target output Provinsi yang telah ditetapkan tidak tercapai.*

3) Penilaian ketepatan Waktu.

a. *Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".*

b. *Sesuai dengan TAO sebagai berikut:*

TAO b.2 *Monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 tidak dilakukan sesuai jadwal*

4) Penilaian Ketepatan Kualitas.

a. *Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi";*

b. *Sesuai dengan TAO sebagai berikut:*

1) TAO b.1 *Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti;*

2) TAO c.1 *Kualitas cold chain vaksin di daerah Provinsi seperti, cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer tidak memadai.*

c. *Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas*

5) Penilaian Ketepatan Administrasi

a. *Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan rekomendasi*

b. *Sesuai dengan TAO sebagai berikut:*

1) TAO b.1 *Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti;*

2) TAO b.5 *Permasalahan KIPi tidak segera ditindaklanjuti;*

3) TAO b.6 *Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di Provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

6) Hal – hal yang perlu diperhatikan.

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas Kesehatan Provinsi namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO.

8. Hasil Audit Uji Petik di Rumah Sakit Pemda Prov dan Fasyankes lainnya

Merupakan hasil temuan yang dijumpai di fasyankes di wilayah provinsi yang dilakukan uji

petik.

a. Informasi Umum

1) Jumlah uji petik audit Fasyankes pelaksana vaksinasi.

Menginformasikan jumlah Fasyankes Pelaksana Vaksinasi yang dilakukan uji petik dengan membuat tabel seperti contoh.

Contoh: Tabel-5

No	Nama Fasyankes	Alamat	Kepala/Pimpinan Fasyankes / NIP	SK Penetapan		Jadual Vaksinasi
				Nomor	Tanggal	
1.	RSUD Prov A					
2.	RSUD Prov B					
3.	Fasyankes lainnya					
4.	Dst.....					

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi.

Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggaran dan realisasi anggaran masing – masing RS Pemda Prov, fasyankes lainnya pada periode pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik yang dilakukan uji petik.

Contoh: Tabel-6

No	Fasyankes	Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	%-tase
1.	RSUD Prov A				
2.	RSUD Prov B				
3.	Fasyankes Lainnya				
4.				
Jumlah					

3) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Vaksinasi (Vaksinator)

a. Menginformasikan jumlah SDMK Vaksinator yang ditugaskan (Surat Tugas) dan realisasi fisik SDMK Vaksinator yang bertugas di lapangan pada masing – masing Rumah Sakit Pemda Prov, Fasyankes lainnya dalam periode satu siklus vaksinasi 2 kali suntik yang dilakukan uji petik.

b. Menginformasikan rasio pelayanan SDMK dan Target Sasaran per masing – masing fasyankes

Contoh: Tabel-7

No	Fasyankes	Vaksinator dilatih			Jumlah Vaksinator ditugaskan		
		Dokter	Perawat	Bidan	Dokter	Perawat	Bidan
1.	RSUD Prov A Org Org Org Org Org Org
2.	RSUD Prov B Org Org Org Org Org Org
3.	Fasyankes Lainnya Org Org Org Org Org Org
4.	Dst..... Org Org Org Org Org Org
Jumlah	 Org Org Org Org Org Org

4) Alokasi dan Realisasi Distribusi dan Penggunaan Vaksin

a) Menginformasikan distribusi dan penggunaan vaksin di masing-masing fasyankes.

b) Menginformasikan realisasi distribusi vaksin yang diterima oleh masing-masing fasyankes serta jumlah vaksin yang digunakan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi.

- c) Menginformasikan stock akhir vaksin di masing-masing fasyankes berdasarkan catatan (isian kolom 5) dan stock akhir vaksin berdasarkan stock opname (isian kolom 6)
- d) Menginformasikan selisih stock akhir berdasarkan catatan dan stock opname dan menjelaskan kondisi selisih vaksin (isian kolom 7)
- e) Menginformasikan kondisi vaksin (isian kolom 8).

Contoh:Tabel-8

No	Nama Fasyankes	Berdasarkan Catatan			Sisa Vaksin (Stock Opname)	Selisih	Keterangan
		Vaksin diterima	Vaksin digunakan	Sisa Vaksin			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7=5-6)	(8)
1.	RSUD A	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
2.	RSUD B	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
3.	Fasyankes lain	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
4.	Dst.....	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	
Jumlah		...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	...Vial	

Sumber Data:..... Per tanggal:

5) Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi

- a) Menginformasikan total target sasaran vaksinasi dan realisasi dalam periode satu siklus vaksinasi (2x suntik)
- b) Jumlah sasaran yang hadir ke masing-masing Fasyankes yang dilakukan uji petik (isian kolom 3)
- c) Jumlah sasaran (hadir) hasil pelayanan 4 meja di masing-masing fasyankes yang dilakukan uji petik (isian kolom 4,5)
- d) Jumlah sasaran yang ditolak oleh sistem (isian kolom 6)
- e) Jumlah sasaran yang hanya menerima satu kali suntikan dan tidak hadir pada saat jadwal suntikan ke 2 (DO) di masing-masing fasyankes yang dilakukan uji petik (isian kolom 7)
- f) Jumlah kejadian KIPI pada masing-masing fasyankes yang diuji petik (isian kolom 8)

Contoh: Tabel-9

No	Nama Fasyankes	Hadir	Hasil Skrining		Ditolak	DO	KIPI
			Divaksin	Ditunda/Tidak diberikan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	RSUD Prov A	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
2.	RSUD Prov B	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
3.	Fasyankes lain	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
4.	Dst.....	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
Jumlah		...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org

6) Temuan Hasil audit Uji Petik pada RSUD Provinsi dan Fasyankes lainnya.

a. Penilaian Ketepatan Sasaran.

- 1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran pada

pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

TAO b.4 Pelaksanaan vaksinasi tidak tepat sasaran

b. Penilaian Ketepatan Jumlah.

1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan pimpinan fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1) TAO b.2 Terdapat kejadian Drop Out;

2) TAO c.2 Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak tercapai

c. Penilaian Ketepatan Waktu.

1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan pimpinan fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

TAO b.2 Monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 tidak dilakukan sesuai jadwal

d. Penilaian Ketepatan Kualitas.

1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan tanggapan pimpinan fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1) TAO a.1 Vaksin COVID-19 tidak disimpan di cold chain sesuai standard

2) TAO a.2 Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar

3) Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas

e. Penilaian Ketepatan Administrasi.

- 1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan pimpinan fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.
- 2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
 - 1) TAO b.1 Pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan
 - 2) TAO b.3 KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti
 - 3) TAO c.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE
 - 4) TAO c.3 Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal
 - 5) TAO c.4 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

f. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di tingkat fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat).

(Temuan lainnya yang tidak ada di TAO).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Inspektur Provinsi

.....
NIP

Tembusan:
Yth. Bupati/Walikota

LOGO/KOP
APIP PROVINSI

LAPORAN KOMPILASI HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA
PROVINSI.....

NOMOR :
TANGGAL : 2021

LOGO/KOP APIP PROVINSI
Identitas dan Alamat

Nomor : 2021
Lampiran : ...
Hal : Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-
19) pada Provinsi.....

Yth. Gubernur.....
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada Provinsi..... berdasarkan Laporan Hasil Audit terlampir (*dibuatkan lampiran daftar Nama Instansi APIP, Nomor dan Tanggal Laporan*), dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- g. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor

HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

h. Surat Tugas Inspektur Provinsi..... Nomor ST-..... tanggal Januari 2021 perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan jumlah audit uji petik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi (*tidak termasuk Fasyankes Kota*) sebagai berikut:

Contoh:Tabel-1

No	Jenis Fasyankes	Jumlah	Keterangan
a)	RSUD Provinsi		
b)	Fasyankes lain		
c)		

2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tahun 2021.... dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes sebanyak fasyankes pada Provinsi... sebanyak.... hari Pemeriksaan, dengan jumlah auditor sebanyakorang. Dengan rincian:

Contoh:Tabel-2

No.	Asal APIP	Jumlah Auditor	Jumlah HP
1.	Inspektorat Provins (B1).		
2.	Itjen KL/TNI/Irwasum (B2)		
3.	BPKP Perwakilan (B2)		
4.	...		
	Jumlah		

Sumber data Lap KODE-B1 dan B2**4. Batasan Tanggung Jawab**

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.
- b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum**5) Identitas auditan**

Menginformasikan nama dan alamat kantor, dan nama, nomor dan tanggal SK jabatan pimpinan kantor Dinas Kesehatan Provinsi.

6) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

- a. *Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik;*
- b. *Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggaran dan realisasi penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi dan fasyankes di wilayah Provinsi.*

Contoh:Tabel-3

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%-tase
a)	APBN			
b)	APBD			
c)	Lainnya (BLU)			
d)	...			
Jumlah				

Sumber data Lap KODE-B1 dan B2**7) Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-19.**

- a. *Merupakan seluruh data dan informasi dalam periode waktu pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik;*

- b. Menginformasikan alokasi vaksin (top down Pusat) dari Pusat dan realisasi vaksin yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- c. Menginformasikan alokasi distribusi vaksin (top down Pusat) dari Dinas Kesehatan Provinsi dan realisasi distribusi vaksin ke Kabupaten/Kota se-Provinsi;
- d. Buat lampiran daftar jumlah vaksin dan kabupaten/kota wilayah provinsi penerima vaksin.

Contoh:Tabel-4

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
	Alokasi dari Pusat	Vial	
a.	Diterima dari Pusat	Vial	
b.	Realisasi distribusi Dinkes Kab/Kota	Vial	
c.	Stock Gudang Dinkes Provinsi	Vial	

Sumber data Lap KODE-B1**8) Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.**

- a. Menginformasikan saldo awal (existing) sarana dan logistik pendukung vaksinasi di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi;
- b. Menginformasikan jumlah sarana dan logistik pendukung yang diterima dari Pusat;
- c. Menginformasikan total sarana dan logistik pendukung yang dikirimkan kepada seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
- d. Menginformasikan saldo sarana dan logistik pendukung di Kantor Kesehatan Provinsi;
- e. Dibuatkan lampiran untuk masing – masing kabupaten/kota penerimanya.

Contoh: Tabel-5

No	Jenis Fasyankes	Logistik			APD			Cold Chain				Kartu Vaksinasi
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	
	Alokasi dari Pusat											
	Saldo Awal (milik Dinkes Provinsi sendiri)											
1.	Jumlah diterima (dari Pusat)											
2.	Distribusi ke seluruh kabupaten/kota											
3.	Stock Dinkes Provinsi											

Keterangan:

No	Jenis	Kode	Keterangan	Satuan
A.	Logistik	A.1	Auto Disable Syringe	Pcs
		A.2	Alcohol Swab	Pcs
		A.3	Safety Box	Pcs
B.	APD	B.1	Masker	Pcs
		B.2	Face Shield	Pcs
		B.3	Sarung Tangan	Pcs
C.	Cold Chain	C.1	Vaccine Refrigerator	
		C.2	Cold Box	
		C.3	Cold Pack	

		C.4	Vaccine Carrier		
D.	Kartu Vaksinasi	D			

Sumber data Lap KODE-B1

7. Temuan audit.

Merupakan integrasi temuan audit dari LAP Kode-B1 dan B2

7) Penilaian ketepatan Sasaran

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes Provinsi terdapat target sasaran yang tidak sesuai kriteria dan prioritas kelompok sebanyakorang dengan rincian sebagai berikut:

.....

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;*
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;*
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian tidak tepat sasaran pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes yang telah dilakukan uji petik*

Hal ini disebabkan:

- c. ...*
- d. ...*

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:

- a.*
- b.*

8) Penilaian ketepatan Jumlah.

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes wilayah Provinsi terdapat temuan audit tidak tepat jumlah dengan rincian sebagai berikut:

.....

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;*
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;*
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian tidak tepat jumlah pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes yang telah dilakukan uji petik*

Hal ini disebabkan:

- a. ...*
- b. ...*

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati

tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:

- c.
- d.

9) Penilaian Ketepatan Waktu

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes terdapat ketidaksesuaian distribusi atau ketidaksiapan terkait sarana pendukung, logistik dengan jadwal pelaksanaan vaksinasi di fasyankes dengan rincian sebagai berikut:

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian tidak tepat waktu pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:

- a.
- b.

10)Penilaian Ketepatan Kualitas.

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat kualitas dengan rincian sebagai berikut:

.....

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian tidak tepat kualitas pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:

- a.
- b.

11)Penilaian Ketepatan Administrasi

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat administrasi dengan rincian sebagai berikut:

.....

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian pengendalian risiko fraud pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

12) Penilaian efisiensi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh).

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;.
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak efisien dan ekonomis pada Dinas Kesehatan Provinsi dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:

- a.
- b.

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:

- a.
- b.

13)Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan vaksinasi.

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian pengendalian risiko fraud pada Dinas Kesehatan Provinsi dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:

- a.
- b.

8. Hal – hal yang perlu diperhatikan

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO bersumber LAP KODE-B1 dan LAP KODE-B2
Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomendasi kepada Gubernur untuk menindaklanjuti hal – hal penting yang menjadi kewenangan Gubernur.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu Gubernur diucapkan terima kasih.

Inspektur Kabupaten/Kota

.....
NIP

Tembusan Yth:

- 1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.....(dukungan LAP KODE-C2)
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.....

LOGO/KOP

BPKP PERWAKILAN PROVINSI

LAPORAN KOMPILASI HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 SE-
PROVINSI.....

NOMOR :
TANGGAL : 2021

LOGO/KOP BPKP PERWAKILAN PROVINSI
Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2021
Lampiran : ...
Hal : Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-
19) se-Provinsi.....

Yth. Gubernur.....
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) se-Provinsi..... berdasarkan Laporan Hasil Audit terlampir (*dibuatkan lampiran daftar Nama Instansi APIP, Nomor dan Tanggal Laporan se-Provinsi*), dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- h. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- i. Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi..... Nomor ST-..... tanggal Januari 2021 perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

- 1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..... dengan jumlah audit uji petik pada Dinas Kesehatan {Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

Contoh: Tabel-1

No	Jenis Fasyankes	Jumlah	Keterangan
a)	Dinas Kesehatan Provinsi...	1	
b)	Dinas Kesehatan Kab/Kota	...	
c)	Puskemas		
d)	Rumah Sakit		
e)	Klinik		
f)	KKP		

Sumber data: Lap KODE A3, B3, C1, D1 dan E1, Rincian terlampir

- 2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.
- 3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tahun 2021 se-Provinsi.... dilaksanakan sebanyak.... hari pemeriksaan, dengan jumlah auditor sebanyak orang. Dengan rincian:

Contoh: Tabel-2

No.	Asal APIP	Jumlah Auditor	Jumlah HP
1.	BPKP Pusat (Kode-E1)		
2.	Itjen K/L/TNI/Irwasum (Kode-D1)		
3.	BPKP Perwakilan (Kode-C1)		
4.	Kompilasi Inspektorat Provinsi (B3)		
5.	Kompilasi Inspektorat Kabupaten/Kota (A3)		
	Jumlah		

Sumber data: Lap KODE A3, B3, C1, D1 dan E1

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.
- b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum

1) Identitas auditan

Menginformasikan jumlah dan jenis auditan yang (Dinas Kesehatan Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, Fasyankes Vertikal, Fasyankes Provinsi, dan Fasyankes Kabupaten sesuai laporan hasil audit yang dikompilasi.

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

- a. *Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik;*
- b. *Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggaran dan realisasi penggunaan anggaran pelaksanaan vaksinasi se-Provinsi.*

Contoh:Tabel-3

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%-tase
a)	APBN			
b)	APBD			
c)	Lainnya (BLU)			
Jumlah				

Sumber data: Lap KODE A3, B3, C1, D1 dan E1

3) Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

- c. Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik;
- d. Menginformasikan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan “existing” dan jumlah yang ditetapkan/ditugaskan (MoU) sebagai pelaksana vaksinasi se-Provinsi.

Contoh:Tabel-4

No.	Jenis Fasyankes	Jumlah Fasyankes		Keterangan
		Existing	Pelaksana Vaksinasi	
a.	Vertikal			
b.	Pemda Provinsi			
c.	Pemda Kabupaten			
d.	Puskesmas			
e.	Klinik			
f.	RS Swasta			

Sumber data: Lap KODE A3

4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Vaksinasi (Vaksinator)

- a. Menginformasikan total Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan vaksinasi Covid-19 dan SDM yang ditugaskan melaksanakan vaksinasi di Fasyankes di wilayah se-Provinsi....;
- b. Menginformasikan rasio pelayanan jumlah SDM yang di tugaskan dibandingkan dengan jumlah Target Sasaran Vaksinasi se-Provinsi.

Contoh:Tabel-5

No	Fasyankes	Vaksinator Ditugaskan			Vaksinator Sudah Dilatih		
		Dokter	Perawat	Bidan	Dokter	Perawat	Bidan
a.	∑Vertikal Org Org Org Org Org Org
b.	∑Pemda Prov Org Org Org Org Org Org
c.	∑Pemda Kab/Kota Org Org Org Org Org Org
d.	∑Lainnya Org Org Org Org Org Org
	Jumlah Org Org Org Org Org Org

Sumber data: Lap KODE A3

5) Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-19.

- a. Merupakan seluruh data dan informasi dalam periode waktu pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali suntik;
- b. Menginformasikan alokasi vaksin (top down Pusat) dari Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan realisasi vaksin yang diterima oleh masing – masing sasaran

Contoh:

**Distribusi vaksin Pusat ke Provinsi dan pengiriman ke Kabupaten/Kota se-
Provinsi**

Contoh: Tabel-6

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Alokasi dari Pusat	Vial	
a.	Diterima dari Pusat	Vial	
b.	Realisasi distribusi ke Kab/Kota	Vial	
c.	Stock Gudang Dinkes Provinsi	Vial	

Sumber data: Lap KODE B3

Agar dibuatkan lampiran distribusi vaksin dari Dinkes Provinsi kepada masing – masing kabupaten/kota penerima vaksin.

Distribusi vaksin dari Dinkes Kabupaten/Kota ke Fasyankes wilayahnya.

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Vaksin		Ket.
			Diterima=tabel-6 kolom (4) b.	Dikirim	
1.	Diterima dari Dinkes Provinsi	Vial		
2.	Realisasi distribusi Fasyankes				
	m. \sum Puskesmas	Vial		
	n. \sum RSUD Kab/Kot	Vial		
	o. \sum RSUD Provinsi	Vial		
	p. \sum UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll)	Vial			
	q. \sum Klinik Swasta	Vial			
	r. \sum RS Swasta	Vial			
	Jumlah distribusi	Vial		
3.	Stock Gudang Dinkes Kabupaten/Kota	Vial		

Sumber data: Lap B3, Rincian terlampir

Agar dibuatkan lampiran distribusi vaksin dari masing – masing kabupaten/kota penerima vaksin kepada fasyankes di wilayahnya.

6) Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi.

- a. Merupakan seluruh data dan informasi dalam satu periode pelaksanaan satu siklus vaksinasi (2 kali suntik) se-Kabupaten/Kota
- b. Menginformasikan total alokasi vaksin (dosis) yang diterima di masing – masing Fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;
- c. Menginformasikan total target sasaran vaksinasi di masing – masing Fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;
- d. Menginformasikan total hasil catatan pelayanan di “4 (empat) meja” di masing – masing fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;

- e. Menginformasikan total saldo vaksin yang masih belum di gunakan di masing-masing fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota.

Contoh: Tabel-7

No	Jenis Fasyankes	Target Sasaran dalam aplikasi	Hadir	Hasil Skrining		Batal	DO	KIPI
				Divaksin	Ditunda			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kota...	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
2.	Kabupaten...	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
3.	Kabupaten...	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
4.	Kabupaten...	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
5.	Kabupaten...	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
6.	Kabupaten...	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
Jumlah		...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	

Tabel-7 dibuatkan lampiran rincian Fasyankes untuk masing – masing Kabupaten/Kota.

Contoh:Tabel-7.1 (lampiran tabel-7 untuk Kabupaten/Kota)

No	Jenis Fasyankes	Alokasi Sasaran dalam aplikasi	Hadir	Hasil Skrining		Batal	DO	KIPI
				Divaksin	Ditunda			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	∑ Puskesmas	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
2.	∑ RSUD Kab/Kot	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
3.	∑ RSUD Provinsi	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
4.	∑ UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll)	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
5.	∑ Klinik Swasta	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
6.	∑ RS Swasta	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org
Jumlah		...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	...Org	

Sumber data: Lap KODE A-3

7) Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.

- Menginformasikan saldo awal (existing) sarana dan logistik pendukung vaksinasi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Menginformasikan jumlah sarana dan logistik pendukung yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi/Pusat;
- Menginformasikan total sarana dan logistik pendukung yang dikirimkan kepada seluruh fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;
- Menginformasikan saldo sarana dan logistik pendukung di Kantor Kesehatan Kabupaten/Kota.

Distribusi sarana pendukung dan logistik dari Kemkes Pusat ke Dinkes Provinsi dan pengirimannya ke Kabupaten/Kota se-Provinsi

Contoh: Tabel-8

No	Uraian	Logistik			APD			Cold Chain (Nihil jk tdk ada)				Kartu Vaksinasi	
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D	
	Alokasi Pusat												
1.	Saldo Awal (milik Dinkes Provinsi sendiri)												
2.	Jumlah diterima (dari Kemkes Pusat)												
3.	Distribusi ke Dinkes Kab/Kota												
4.	Stock Dinkes di Provinsi												

Agar dibuatkan rincian distribusi sarana pendukung dan logistik dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Kabupaten/Kota dan fasyankes di wilayahnya.

Contoh: tabel-8.1 (lampiran tabel-8 untuk kabupaten/kota)

No	Uraian	Logistik			APD			Cold Chain (Nihil jk tdk ada)				Kartu Vaksinasi	
		A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D	
1.	Saldo Awal (milik Dinkes Kabupaten/Kota sendiri)												
2.	Jumlah diterima (dari Dinkes Provinsi/Pusat)												
3.	Distribusi ke Fasyankes												
	A Σ Puskesmas												
	B Σ RSUD Kab/Kot												
	C Σ RSUD Provinsi												
	D Σ UPT Vertikal (RS Pemerintah Pusat, KKP dll)												
	E Σ Klinik Swasta												
	F Σ RS Swasta												
	Jumlah dikirim ke Fasyankes												
4.	Stock Dinkes di Kab/Kota (1+2-3)												

Sumber data: Lap KODE-A3

Keterangan:

No	Jenis	Kode	Keterangan	Satuan
A.	Logistik	A.1	Auto Disable Syringe	Pcs
		A.2	Alcohol Swab	Pcs
		A.3	Safety Box	Pcs
B.	APD	B.1	Masker	Pcs
		B.2	Face Shield	Pcs
		B.3	Sarung Tangan	Pcs
C.	Cold Chain	C.1	Vaccine Refrigerator	
		C.2	Cold Box	
		C.3	Cold Pack	
		C.4	Vaccine Carrier	
D.	Kartu Vaksinasi	D		

--	--	--	--	--	--

7. Temuan audit.

Merupakan resume integrasi temuan audit dari LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1.

1) Penilaian ketepatan Sasaran

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat target sasaran yang tidak sesuai kriteria dan prioritas kelompok sebanyakorang dengan rincian sebagai berikut:

.....

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A3, B3, C1, D1 dan E1.A3 dan B3;*
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;.*
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat sasaran pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik*

Hal ini disebabkan:

- a. ...*
- b. ...*

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.*
- b.*

2) Penilaian ketepatan Jumlah.

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat jumlah atas distribusi vaksin, sarana pendukung dan logistik dalam rangka pelaksanaan vaskinasi dengan rincian sebagai berikut:

.....

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1;*
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;*
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat jumlah pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik*

Hal ini disebabkan:

- a. ...*
- b. ...*

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

3) Penilaian Ketepatan Waktu

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat kegitatasn distribusi vaksin, sarana pendukung dan logiistik yang tidak sesuai jadwal pelaksanaan vaksinasi di fasyankes dengan rincian sebagai berikut:

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1.;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi,;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat waktu pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

4) Penilaian Ketepatan Kualitas.

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat kualitas terkait tempat penyimpanan vaksin dan layanan pelaksanaan vaksinasi (KIPI) dengan rincian sebagai berikut:

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat kualitas pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati

tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

5) Penilaian Ketepatan Administrasi

Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat administrasi pada tindak lanjut hasil monitoring dan pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan dalam rangka pelayanan vaksinasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1.;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi.;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat administrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

6) Penilaian efisiensi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh).

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi.;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak efisien dan ekonomis pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

sebagai berikut:

- a.
- b.

7) Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan vaksinasi.

- a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1;
- b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
- c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian pengendalian risiko fraud pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a.
- b.

8. Hal – hal yang perlu diperhatikan

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO bersumber LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1.

Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomendasi kepada Gubernur untuk menindaklanjuti hal – hal penting yang menjadi kewenangan Gubernur..

Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapak Gubernur... diucapkan terima kasih.

Kepala BPKP Perwakilan

.....
NIP

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Deputi Kepala BPKP PIP Bidang Polhukam PMK
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.....

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG
PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
KEBUDAYAAN,

IWAN TAUFIQ PURWANTO